

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadaan kehidupan masyarakat saat sekarang ini buruk akibat adanya wabah pandemic covid-19 atau virus severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARs-CoV-2) yang menyerang diseluruh dunia menyebabkan terjadinya permasalahan diberbagai bidang dalam aspek kehidupan masyarakat diantaranya, pendidikan, sosial, budaya, pariwisata dan ekonomi. Sejak kemunculannya pada tahun 2019 akhir, lalu sampai saat sekarang ini pandemic covid-19 masalah yang ditimbulkan masih belum teratasi secara maksimal hingga saat ini, bahkan melihat keadaan sekarang semakin memburuk serta belum kembali normal seperti sedia kala selain menimbulkan permasalahan di bidang kesehatan, pendidikan. Pandemi covid-19 juga turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terhitung dari agustus 2020 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II negative atau kurang menjadi 5,32%. Sebelumnya, pada triwulan I 2020, BPS melaporkan laju pertumbuhan ekonomi hanya 2,97%, jauh lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% pada priode yang sama 2019 lalu, maka dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi saat ini, pertumbuhan ekonomi indonesia melambat tajam yang membawa dampak terhadap bidang bisnis dan pendapatan perusahaan sehingga merambat ke para tenaga kerja dari perusahaan tersebut (BPS, 2020).

Sejak kemunculan virus covid-19 banyak perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat yaitu adanya kebudayaan dan peraturan baru seperti menjaga jarak, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan menggunakan

handsanitizer untuk mensterilkan tangan. Hal ini tentu merupakan upaya pemerintah untuk menekan pertumbuhan virus covid-19 selain itu akibat dari adanya pandemi tersebut tidak hanya dari kebiasaan saja yang berubah dunia ketegakerjaan juga ikut berdampak banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan akibat dari banyaknya perusahaan yang melakukan resign kepada pegawai atau melakukan pemotongan gaji sehingga akan menimbulkan permasalahan di masa pandemic diantaranya penurunan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan akibat merosotnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di indonesia juga dapat menimbulkan permasalahan terhadap bidang ketenagakerjaan yang bisa dilihat dari sisi perusahaan dan pekerja. Berdasarkan paparan dan hasil riset pusat penelitian kependudukan LIPI pada tahun 2020, tenaga kerja indonesia yang terkena Putus Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 15,6% (2,6 juta) dan menjadi 9,7 juta dan tenaga kerja mengalami kemerosotan dan pengurangan pendapatan sebesar 40% (15,71 juta) dampaknya terjadi kenaikan angka pengangguran di indonesia pada saat pandemic covid-19 karena banyaknya perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan sehingga biaya membayar gaji karyawan tidak dapat dipenuhi. Maka dari pada itu banyaknya perusahaan yang mengambil kebijakan untuk melakukan Pemangkasan karyawan atau mengurangi dan menurunkan gaji karyawan agar Perusahaan Tetap ada dan bertahan. Fenomena tersebut tentu akan merambat kepada permasalahan yang lain terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari (BPS 2021).

Permasalahan yang semakin kompleks tentu akan berpengaruh kepada kehidupan penduduk dan kesejahteraanya, sedangkan menurut BPS menjelaskan,

pemenuhan kebutuhan dasar manusia menjadi tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa melalui penyelenggaraan rumah dan permukiman agar masyarakat dapat bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau didalam perumahan yang sehat, aman harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah indonesia, sebagaimana tertuang dalam UU No 11 Tahun 2011. Pemenuhan kewajiban dalam menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman bagi rakyatnya adalah dalam rangka memenuhi hak-hak sipil, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya warga negara. Penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak, aman dan terjangkau bagi semua orang yang telah menjadi komitmen global sebagaimana yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* untuk itu pemerintah bertanggung jawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal dan juga dalam pemenuhan kebutuhan. Namun kesejangan akibat dari adanya fenomena pandemi mengganggu kestabilan hidup masyarakat yang semakin parah (Badan Pusat Statistik Nasional 2018).

Melihat keadaan masyarakat, terutama yang berdampak pada masa pandemi untuk menjaga stabilitas hidup masyarakat, pemerintah indonesia membuat dan menyelenggarakan kembali program bantuan kepada masyarakat miskin terutama masyarakat yang berdampak pada masa pandemi, program (BLT) bantuan langsung tunai diperuntukan bagi warga miskin yg terdampak akibat adanya wabah pandemi covid-19 hukum dan kebijakan yang memuat kedalam asas aturan peruntukan BLT- dana desa yang merujuk di undang-undang, peraturan menteri desa, wilayah tertinggal dan transmigrasi (PDTT); peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri keuangan, instruksi menteri dalam negeri, instruksi menteri desa

(PDTT), surat menteri desa PDTT, surat direktur jendral pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa kementerian desa (PDTT); dan surat edaran KPK .

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) awalnya di terbitkan oleh pemerintah pada bulan oktober 2005 disaat itu terjadinya kenaikan BBM yang mengakibatkan ketidak stabilan perekonomian, banyak bahan makanan pokok yang harganya melonjak tinggi. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehingga mengganggu stabilitas kehidupan sosial melihat hal tersebut akhirnya pemerintah merasa perlu melaksanakan program program kompensasi pengurangan subsidi (PKPS-BBM) yang merupakan bantuan langsung tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin (KRM) yang di harapkan mampu mengurangi beban dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. dan untuk keberjalanan program ini pemerintah memerlukan data kependudukan miskin yang bersifat mikro sehingga diharapkan agar program bisa terarah dan tepat sasaran bagi rumah tangga miskin, (Reni,2007).

Program bantuan langsung tunai (BLT) di masa pandemi covid-19 adalah bantuan yang ditujukan untuk penduduk miskin dan penduduk yang berdampak dimasa Pandemi yang bersumber dari dana desa. Masyarakat miskin merupakan orang atau sekelompok orang dalam situasi kondisi fisik tidak mempunyai prasarana dan saran pengembangan dasar lingkungan yang mencukupi, dengan kelayakan rumah dan keadaan lingkungan yang jauh di bawah standar kelayakan yang baik dan matapencaharian tidak menetap dan juga pendapatan jauh dari berkecukupan untuk pemenuhan kebutuhan yang mencangkup kekurangan di berbagai bidang secara keseluruhan, yaitu politik, sosial masyarakat, lingkungan sekitar dan pemenuhan ekonomi (P2KP,Pedoman Umum, 2004:1). Program

Bantuan Langsung Tunai (BLT) ialah program bantuan yang diberikan kepada penduduk tidak mampu dan penduduk yang mengalami dampak penurunan ekonomi di masa pademi, pada setiap bulannya tunai dalam bentuk uang sebesar Rp 300.000 serta bantuan sembako untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta bertujuan untuk menstabilkan keadaan hidup masyarakat dimasa pandemi. Kebijakan ini di tetapkan dan diatur oleh pemerintahan pusat hingga ke pemerintahan daerah sebagai penyalur di tingkat daerah (Panduan BLT,2020).

Prioritas penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan masyarakat yang kehilangan pekerjaan mereka yang kehilangan pekerjaan menjadi sasaran utama sebagai penerima bantuan tersebut dimana kehilangan pekerjaan dihitung ketika seseorang kehilangan pekerjaan selama masa pandemic covid-19 dimana tidak dihitung masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, hal ini bertujuan agar bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat yang kehilangan pekerjaan pada masa pandemic covid-19 dan memang sesuai dengan umur ketenaga kerjaan. Menurut Priyono dan Yasin (2016) usia tenaga kerja adalah usai produktif bagi setiap individu usia bagi tenaga kerja berada diantara 20 hingga 40 tahun, usia ini dianggap sangat produktif bagi tenaga kerja karena apabila usia dibawah 20 tahun rata-rata individu masih belum memiliki kematangan skill yang cukup selain itu juga masih dalam proses pendidikan. Sedangkan pada usia diatas 40 tahun mulai terjadi penurunan kemampuan fisik bagi individu, bantuan BLT dimaksudkan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan dimana tenaga kerja yang terancam tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari diutamakan masyarakat yang sudah berumah tangga dan memiliki tanggungan hidup yang menjadi prioritas utamanya.

Realitanya pelaksanaan program (BLT) bantuan tunai langsung tidak tersalurkan dengan tepat. hal ini menimbulkan anggapan negative masyarakat desa Batumbulan Baru bahwa program bantuan tunai tersebut tidak berdasarkan dengan buku panduan yang telah diterbitkan oleh pemerintah melalui kementerian desa yang mengakibatkan adanya indikasi penyaluran tidak sesuai dengan sasaran yang seharusnya, hal ini dibuktikan dengan program bantuan tunai dari pemerintah dimaksudkan untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin dan penduduk yang terdampak penurunan ekonomi di masa pandemic covid-19, mengalami banyaknya terjadi ketimpangan dan permasalahan pada saat pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai diantaranya : terjadinya keterlambatan pembagian bantuan pada masyarakat miskin/masyarakat yang berdampak pandemic covid-19 dan juga terdapat penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran yang telah di tentukan sesuai dengan kriteria yang ada buku panduan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan juga dampak yang dirasakan penduduk selama mendapat bantuan langsung tunai pada masa pandemi covid-19 yang telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDPT). Berdasarkan hasil observasi awal dari pemaparan pengulu kute Desa Batumbulan Baru ada 75 kk yang menerima bantuan langsung tunai sedangkan di Desa Batumbulan Baru hasil dari pemaparan pemerintah desa bahwa ada 100 rumah tangga atau sebanyak 25% dari total dari rumah tangga di Desa Batumbulan Baru yang termasuk kedalam rumah tangga atau penduduk prasejahtera/tidak sejahtera dan yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 75 orang/kepala keluarga. Maka dari itu perlunya melakukan evaluasi penyaluran dan kajian ulang terhadap ketepatan

sasaran dalam pelaksanaan dan penerapan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan juga dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang menerima yang diharapkan agar benar-benar sesuai dan didapatkan oleh masyarakat yang berhak. Evaluasi akan implementasi program penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dijalankan agar penyaluran bantuan tersebut kebermanfaatannya serta dampak dari BLT yang bisa secara langsung dapat dirasakan untuk masyarakat khususnya masyarakat miskin dan juga masyarakat yang mengalami kesulitan pada masa pandemic covid-19 yang ada di desa Batumbulan Baru Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.

Program bantuan langsung tunai (BLT) dimasa pademi covid-19 keberadaannya sangat berpengaruh bagi kehidupan dan membantu masyarakat miskin di desa Batumbulan baru. Jika dilihat dari implementasi penyaluran BLT dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di masa pandemic bila penyaluran dan implementasi telah sesuai serta tepat sasaran bagi rumah tangga yang kurang mampu atau membutuhkan dan berdampak pada saat pandemic serta dampak yang dirasakan masyarakat penerima BLT. Maka dari pada itu perlunya kajian lebih lanjut tentang program bantuan langsung tunai (BLT) terhadap penyaluran dan juga pelaksanaannya. Berdasarkan ini lah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengambil judul penelitian “Analisis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Miskin (Studi Kasus Desa Batumbulan Baru Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka beberapa masalah yang dapat teridentifikasi sebagai Berikut:

1. Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Batumbulan Baru belum sesuai dan tidak tepat sasaran sebagaimana mestinya. Dalam 2 tahun terakhir selama pandemic covid-19 banyaknya penyaluran yang tidak sesuai dan tidak tepat terhadap kriteria yang ada di buku panduan dari Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDPTT).
2. Penyaluran dan penerimaan bantuan tunai langsung (BLT) di Desa Batumbulan Baru sering terjadi kendala dalam pembagiannya.
3. Akibat adanya pandemi covid-19 masyarakat banyak kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4. Terjadinya penurunan ekonomi masyarakat selama masa pandemic covid-19.
5. Masih tingginya angka penduduk keluarga prasejahtera/belumsejahtera yang di kaji dari segi sosial ekonomi di Desa Batumbulan Baru yaitu berdasarkan data yang disampaikan oleh kepala desa 100 keluarga yang masih di kategorikan kedalam keluarga dan penduduk yang prasejahtera sehingga kebermanfaatan bantuan langsung tunai (BLT) tidak merata dirasakan.

C. Pembatasan Masalah

Luas dan banyaknya cakupan masalah yang terdapat dan di temui pada penelitian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah dan pada identifikasi masalah, maka pembatasan masalah dilakukan agar pelaksanaan

penelitian harapannya lebih tepat dan lebih baik. Dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada penyaluran bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin dan penduduk yang terdampak disaat pandemi di Desa Batumbulan Baru serta dampak BLT bagi masyarakat.

Sejalan dengan itu akan diteliti juga pandangan masyarakat dan pemerintah desa terhadap dampak yang dirasakan dari adanya program Bantuan Tunai Langsung (BLT) di masa pandemi covid-19 yang dinilai dari kebermanfaatannya serta dampak bantuan tersebut terhadap masyarakat yang membutuhkan dan membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat di masa pandemic covid-19 dimasa pandemic covid-19 dan juga permasalahan yang dihadapi pada saat pelaksanaan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin pada masa pandemic covid-19.

D. Rumusan Masalah

Dilihat dari batasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pada saat penyaluran program BLT di Desa Batumbulan Baru Kabupaten Aceh Tenggara di masa pandemi covid-19 ?
2. Bagaimana dampak program BLT bagi masyarakat pada masa pandemi covid-19 di Desa Batumbulan Baru Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan juga kendala yang dihadapi pada saat pembagian/penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Batumbulan Baru Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa pandemic covid-19 di desa Batumbulan Baru Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagi dinas pemerintahan, sebagai bahan masukan pada saat hendak mengambil keputusan untuk menentukan langkah dan kebijakan selanjutnya tentang pelaksanaan program bantuan dan kesesuaiannya.
2. Meningkatkan pengetahuan dan cakrawala berfikir bagi penulis yang menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi dan menambah pengetahuan penulis terhadap penerapan program pemerintah yang bertujuan untuk mengsejahterakan masyarakat.
3. Bisa dijadikan bahan rujukan dan perbandingan teruntuk peneliti lain khususnya memiliki objek yang sama tapi tempat dan waktu yang berbeda dengan pelaksanaan yang diteliti. sehingga dapat memberikan peran optimal bagi desa penelitian Lain.